



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031-866369

Email ; surabaya@dilmil-surabaya.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok tersebut, telah disusun satu Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023. Laporan ini memuat data dan informasi tentang pelaksanaan tugas di bidang kepaniteraan, kesekretariatan dan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menjalankan peran sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal penyelesaian perkara di tingkat pertama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara secara transparan, efektif dan akuntabel. Komitmen yang kuat juga terwujud dalam upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tetap mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih di tahun 2019. Upaya lainnya yaitu dengan terus berinovasi dan memberikan Pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).



Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah dilakukan secara optimal dan seobyektif mungkin, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, diharapkan dapat membantu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di masa mendatang.

Sidoarjo, 15 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Cnk NRP 11980058680275



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Profil Peradilan	10
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	14
BAB II MANAJEMEN PERKARA	16
A. Keadaan Perkara	16
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	16
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	24
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	24
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	24
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	24
B. Penyelesaian Perkara	26
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	26
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	27
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	28
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	29
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)	29
1. Posbankum	31
2. Pelayanan Sidang Keliling	31
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	32
4. Keuangan Dari Perkara	33
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	34
A. Data Sebaran Pegawai	35
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	35
2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	36
3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	36
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	37
5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	38
B. Mutasi	38
1. Mutasi Keluar	39
2. Mutasi Masuk	39
C. Promosi	40
1. Kenaikan Pangkat	41
2. Kenaikan Jabatan	41



D.	Pensiun	42
E.	Pendidikan Dan Pelatihan	43
F.	Ujian/ Test Kenaikan Golongan	47
G.	Pengembangan Kompetensi	47
I.	Focus Group Discussion(FGD), Rapat Koordinasi dan Sarasehan	48
H.	Data Kunjungan / Magang Mahasiswa	49
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	52
A.	Pengelolaan Keuangan	52
	1. DIPA Dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	53
	2. DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	57
B.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	59
	1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana	60
	2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	61
	3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	66
	4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana	66
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	66
	1. Implementasi e-Court	67
	2. Implementasi SIPP	68
	3. Dukungan Aplikasi	69
	4. Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	70
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	72
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	72
B.	Penilaian Zona Integritas	74
C.	Sertifikasi ISO	74
D.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	75
E.	Inovasi Pelayanan Publik	76
F.	Pelayanan Kepada Masyarakat	80
G.	Hasil Survei Pelayanan Publik	81
	1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	83
BAB VI	PENGAWASAN	84
A.	Pengawasan Internal	84
	1. Pengawasan Bidang	85
	2. Penanganan Gratifikasi	87
	3. Penerapan SPIP	87
	4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	88
B.	Pengawasan Eksternal	89
C.	Evaluasi	92
	1. Evaluasi Pengawasan Bidang	92
	2. Evaluasi Penanganan Gratifikasi	94
	3. Evaluasi Penerapan SPIP	94
	4. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	95



BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

96

96

97



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	11
Gambar I.2	Struktur Organisasi	13
Gambar II.3	Sertifikat ISO 9001:2015	31
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	73
Gambar V.2	Piagam Penghargaan WBK	74
Gambar V.3	Sertifikat ISO 9001:2015	75



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	17
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	19
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	19
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	20
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu	25
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	25
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	27
Tabel II.8	Pelaksanaan Sidang Keliling	32
Tabel II.9	Jumlah Biaya Perkara	33
Tabel III.1	Data Pegawai	34
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	35
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	36
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	37
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	38
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	39
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	40
Tabel III.9	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	41
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai	42
Tabel III.11	Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	43
Tabel III.12	Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai	44
Tabel III.13	Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai	45
Tabel III.14	Daftar Peserta Ujian / Test Kenaikan Golongan	47
Tabel III.15	Daftar Pengembangan Kompetensi SDM	47



Tabel III.16	Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan	48
Tabel III.17	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	50
Tabel IV.1	Revisi DIPA 01	53
Tabel IV.2	Pagu Anggaran DIPA 01	56
Tabel IV.3	Pengelolaan DIPA 01	56
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran DIPA 01	57
Tabel IV.5	Revisi DIPA 05	57
Tabel IV.6	Pengelolaan DIPA 05	59
Tabel IV.7	Realisasi Anggaran DIPA 05	59
Tabel IV.8	Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana	61
Tabel IV.9	Rincian Tanah	61
Tabel IV.10	Rincian Gedung	62
Tabel IV.11	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	63
Tabel IV.12	Daftar Kendaraan Dinas	63
Tabel IV.13	Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi	63
Tabel IV.14	Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi	65
Tabel IV.15	Daftar Aset Tetap Lainnya	65
Tabel IV.16	Spesifikasi Perangkat Server	71
Tabel V.1	Data Layanan Melalui PTSP	76
Tabel V.2	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	80
Tabel V.3	Data Peminjaman Ruang Sidang	81
Tabel V.4	Survei IKM Tahun 2023	82
Tabel V.5	Survei IPK Tahun 2023	83
Tabel VI.1	Pengaduan Masyarakat	89
Tabel VI.2	LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periode 2022	91
Tabel VI.3	LHKASN Seluruh Pegawai Sipil (PNS)	92



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2023	18
Grafik III.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	36
Grafik III.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL PERADILAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

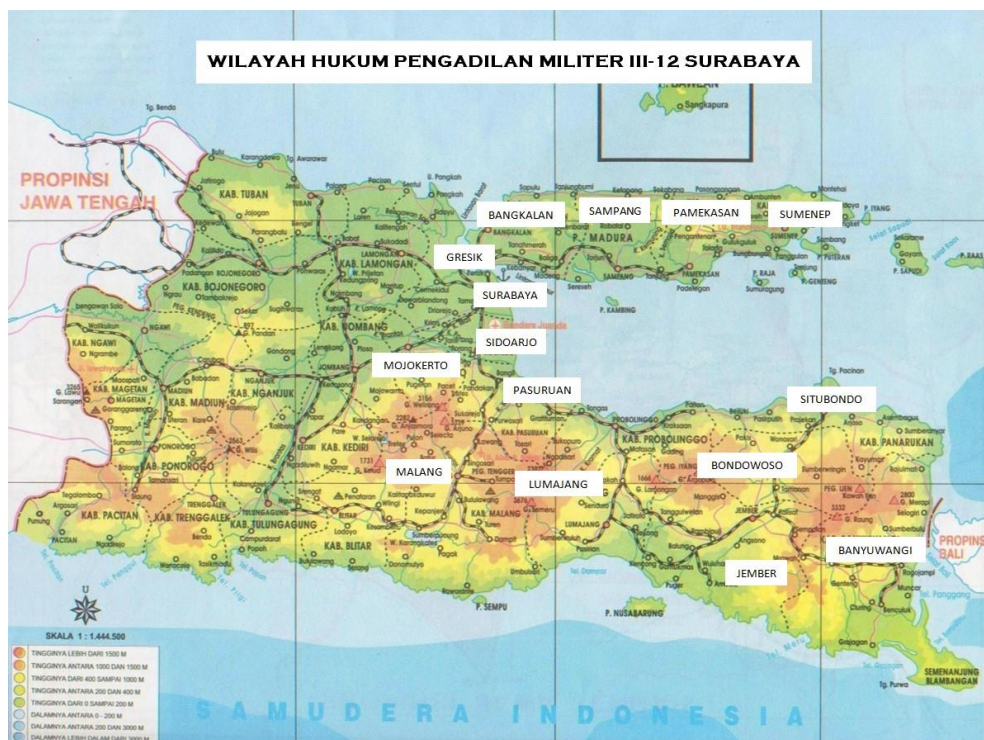
1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



- 2 Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.



Visi dan misi ini disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

VISI

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung

MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut :

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri dari :

- a. Panitera Muda Pidana: dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Keuangan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

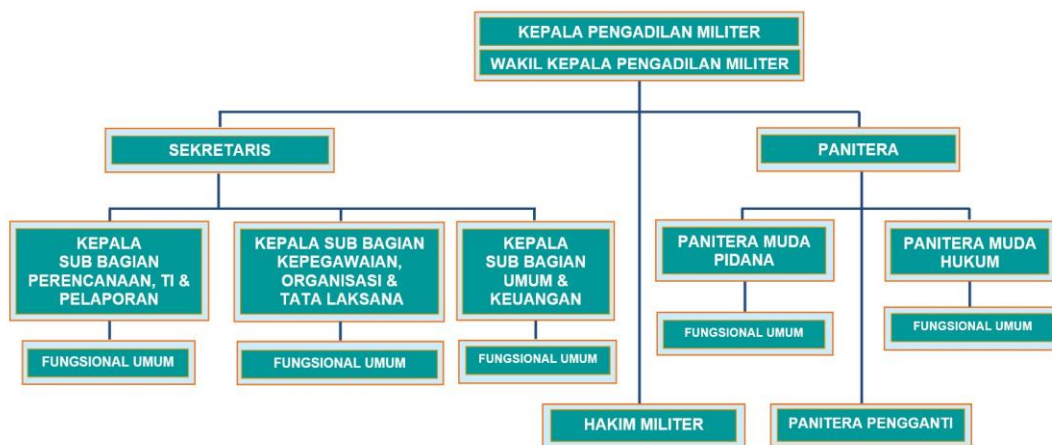
Disamping organisasi struktural, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki organisasi fungsional yaitu kelompok Hakim Militer dan Panitera



Pengganti serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer dan bendahara.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.



I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari



keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2024.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.



BAB II

MANAJEMEN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pelanggaran.

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2022 sebanyak 31 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 181 perkara yang terdiri dari 169 perkara kejahatan dan 12 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2023 sebesar 212 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 191 perkara yang terdiri dari 170 perkara kejahatan, 9 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2023 berjumlah 21 perkara.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi, seiring berjalannya pemeriksaan di Pengadilan Terdakwa berhasil ditangkap sehingga Oditur menghadirkan Terdakwa ke persidangan oleh Majelis Hakim perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Terhadap perkara non inabsensia di persidangan Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa di karenakan Terdakwa kabur.



- Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa di persidangan karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI.

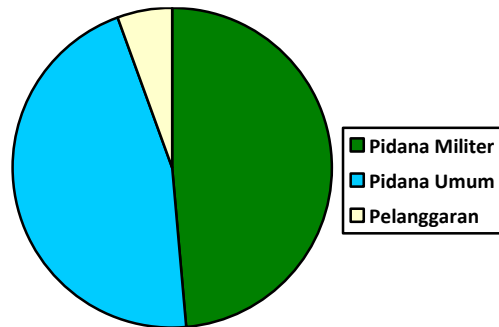
Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2022	23
	Perkara masuk 2023	80
	Total Perkara 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	103
	Sisa perkara 2022 telah diselesaikan di tahun 2023	23
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	64
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2023	16
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2022	8
	Perkara masuk 2023	89
	Total Perkara 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	97
	Sisa perkara 2022 telah diselesaikan di tahun 2023	8
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	84
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2023	5
	Sisa Perkara Pidana Kejahatan TA 2023	21
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2022	0
	Perkara masuk 2023	12
	Total Perkara 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	12
	Sisa perkara 2022 telah diselesaikan di tahun 2023	0
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	12
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2023	0
	Total Sisa Perkara Keseluruhan	21



Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Grafik II.1 Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2023





Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	16	13	2	31	9	14	1	24	8	9	1	18	0	0	0	0	6	7	0	13	1	0	0	1	16	18	2	36
Februari	16	18	2	36	3	5	0	8	5	4	1	10	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	0	0	14	19	1	34
Maret	14	19	1	34	9	6	0	15	11	9	0	20	0	0	0	0	10	5	0	15	0	0	0	0	12	16	1	29
April	12	16	1	29	5	4	0	9	0	6	0	6	0	0	0	0	2	8	1	11	0	2	0	2	17	12	1	30
Mei	17	12	1	30	5	8	0	13	6	4	1	11	0	0	0	0	5	3	1	9	1	0	0	1	15	16	0	31
Juni	15	16	0	31	0	1	0	1	11	7	0	18	0	0	0	0	3	4	0	7	0	0	0	0	4	10	0	14
Juli	4	10	0	14	10	10	2	22	1	4	0	5	0	0	0	0	7	4	0	11	0	0	0	0	13	16	2	31
Agustus	13	16	2	31	5	2	0	7	6	10	1	17	0	0	0	0	4	9	1	14	0	0	0	0	12	8	1	21
September	12	8	1	21	6	15	2	23	10	6	1	17	0	0	0	0	5	9	0	14	0	0	0	0	8	17	2	27
Oktober	8	17	2	27	9	9	1	19	8	7	1	16	0	0	0	0	14	7	0	21	2	0	0	2	7	19	2	28
November	7	19	2	28	11	4	0	15	2	7	1	10	0	0	0	0	3	5	1	9	2	0	0	2	14	16	1	31
Desember	14	16	1	31	7	6	0	13	11	11	0	22	0	0	0	0	15	11	0	26	0	1	0	1	10	10	1	21
JUMLAH					79	84	6	169	79	84	7	170	0	0	0	0	80	75	4	159	6	3	0	9				

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
April	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					12	0	0	12	12	0	0	12	0	0	0	0				



Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel II.4 di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2022	MASUK	PUTUS	DILIMPAHKAN / DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR
1	Pengkhianatan Militer	0	0	0	0	0
2	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
3	Pemata-mataan (<i>spionase</i>)	0	0	0	0	0
4	Tawanan Perang yang melarikan diri	0	0	0	0	0
5	Militer Interniran yang melarikan diri	0	0	0	0	0
6	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
7	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (<i>anti spionase</i>)	0	0	0	0	0
8	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh	0	0	0	0	0
9	Menyerahkan Diri / memberi tanda menyerah tanpa perintah	0	0	0	0	0
10	Melarikan diri / merusak peralatan perang	0	0	0	0	0
11	Menggagalkan suatu operasi militer	0	0	0	0	0
12	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
13	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang	0	0	0	0	0
14	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang	0	0	0	0	0
15	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
16	Merusak suatu perjanjian dengan musuh	0	0	0	0	0
17	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang	0	0	0	0	0
18	THTI	1	10	11	0	0
19	Desersi	7	75	79	0	3
20	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
21	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	0	0	0	0	0
22	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
23	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	4	4	0	0
24	Insubordinasi	0	0	0	0	0
25	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
26	Meninggalkan Pos penjagaan	0	0	0	0	0
27	Menarik Diri Dari Dinas Yang Berbahaya	0	0	0	0	0
28	Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0



29	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa	0	0	0	0	0
30	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
32	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0	0	0	0
33	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	0	0	0	0
34	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pembedanaan	0	0	0	0	0
35	Memerintahakan Bawahan Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas	0	0	0	0	0
36	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
37	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	0	0
38	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
39	Mengabaikan kewajiban Laport adanya kejahatan tertentu	0	0	0	0	0
40	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	0	0	0	0
41	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
42	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang	0	0	0	0	0
43	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
44	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
45	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
46	Perampokan Militer	0	0	0	0	0
47	Penadahan Militer	0	0	0	0	0
48	Pengulangan (<i>Residive</i>) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
49	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang	0	0	0	0	0
50	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
51	Kejahatan terhadap Ideologi Negara	0	0	0	0	0
52	Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
53	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat dan atau Wakilnya	0	0	0	0	0
54	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0
55	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
56	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
57	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	0	0	0	0
58	Kekerasan terhadap orang/barang	2	0	2	0	0
59	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
60	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	0	0	0	0	0
61	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0



62	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0
63	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	0	0	0	0
64	Pemalsuan Meterai dan Merek	0	0	0	0	0
65	Pemalsuan surat	0	2	2	0	0
66	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	2	2	0	1
67	Kesusilaan	2	14	13	0	3
68	Perzinahan	3	3	6	0	0
69	Perkosaan	0	0	0	0	0
70	Pencabulan	1	0	1	0	0
71	Pengobatan untuk mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
72	Perjudian	0	0	0	0	0
73	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0
74	Pencemaran nama baik	0	1	1	0	0
75	Fitnah	0	0	0	0	0
76	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
77	Penculikan	0	0	0	0	0
78	Merampas Kemerdekaan	0	0	0	0	0
79	Pemaksaan	0	0	0	0	0
80	Pembunuhan	1	3	4	0	0
81	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	0	0
82	Penganiayaan	1	6	5	0	2
83	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	0	0	0	0
84	Pencurian	2	5	7	0	0
85	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	0	0	0
86	Penggelapan	2	3	5	0	0
87	Penipuan	3	7	8	0	2
88	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
89	Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak	0	0	0	0	0
90	Penghancuran / perusakan barang	0	0	0	0	0
91	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
92	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
93	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan	0	0	0	0	0
94	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	0	0	0	0
95	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
96	Senjata Api / Senjata Tajam	1	1	1	0	1



97	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
98	Perbankan	0	0	0	0	0
99	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0
100	Korupsi	0	0	0	0	0
101	Minyak dan Gas Bumi / <i>Illegal Drilling</i> dan <i>Illegal Tapping</i>	0	0	0	0	0
102	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	17	13	0	7
103	Kepabeanaan	0	0	0	0	0
104	Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	0	0	0	0	0
105	Pelayaran	0	0	0	0	0
106	Pornografi	0	0	0	0	0
107	Pertambangan / <i>Illegal Mining</i>	0	0	0	0	0
108	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	11	10	0	1
109	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
110	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0
111	Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
112	Narkotika	1	1	2	0	0
113	Perikanan / <i>Illegal Fishing</i>	0	0	0	0	0
114	Pencucian Uang / TPPU	0	0	0	0	0
115	Imigrasi	0	0	0	0	0
116	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0
117	Kehutanan / <i>Illegal Logging</i>	0	0	0	0	0
118	Perlindungan Anak	0	1	1	0	0
119	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
120	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
121	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	0	0	0	0
122	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0
123	Lain-lain	0	0	0	0	0
Total		31	169	179	0	21



2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Dari 179 perkara yang putus tahun 2023, sebanyak 38 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 141 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 adalah sejumlah 34 perkara. Dari 34 Putusan banding tersebut 10 perkara tahun 2023 menyatakan menerima dan 24 perkara tahun 2023 mengajukan upaya hukum kasasi (1 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama).

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Tahun 2023 terdapat 25 perkara yang diajukan kasasi ini, 1 perkara merupakan permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 24 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 179 perkara yang putus tahun 2023, sebanyak 25 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 154 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2023 terdapat 3 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut keduanya merupakan perkara register tahun 2021 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2023.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2023 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun masih terdapat 2 perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2023 Putusannya belum turun.



Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	4
Pidana Umum	34
Kasasi	
Pidana Militer	4
Pidana Umum	21
PK	
Pidana Militer	1
Pidana Umum	2
Jumlah	66

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
179 Perkara	158 Perkara	66 Perkara	96 Terdakwa

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dari jumlah 158 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap, tercatat 95 Terdakwa yang telah menjalani eksekusi, sedang sisanya 63 perkara belum dieksekusi.

Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dari 63 perkara yang sudah BHT namun yang belum dieksekusi tersebut adalah 56 Terdakwa perkara desersi yang Terdakwanya sampai sekarang belum tertangkap dan dalam kondisi sakit 4 Terdakwa, tugas layar 1 Terdakwa, dalam proses hukum perkara lain 2 Terdakwa.



B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan tugas pokok organisasi selama tahun 2023 adalah sebagaimana diuraikan berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2022 sejumlah 31 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan.

31 sisa perkara ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2023 yaitu :

- 7 perkara diregister bulan Desember 2022 dan 1 perkara putus dibulan Januari, 2 Perkara putus di bulan Februari dan 4 Perkara yang putus di bulan Maret 2023.



- 14 perkara diregister bulan November 2022 dan 7 perkara putus dibulan Januari, 5 Perkara putus di bulan Februari, 1 Perkara yang putus di bulan Maret 2023 dan 1 Perkara yang putus dibulan April 2023
- 9 perkara diregister bulan Oktober 2022 dan putus dibulan Januari 2023.
- 1 perkara diregister bulan Agustus 2022 dan putus dibulan Januari 2023

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	19	0	0	19
Februari	10	0	0	10
Maret	20	0	0	20
April	8	0	0	8
Mei	12	0	0	12
Juni	18	0	0	18
Juli	5	0	0	5
Agustus	17	0	0	17
September	17	0	0	17
Oktober	18	0	0	18
November	12	0	0	12
Desember	23	0	0	23
Jumlah	179	0	0	179

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2023 sebanyak 179 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga prosentase perkara



yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 191 perkara yang terdiri dari 170 perkara kejahatan, 9 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2023 berjumlah 21 perkara. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 66 perkara dengan rincian upaya hukum banding 38 perkara, upaya hukum kasasi 25 perkara dan upaya hukum Peninjauan kembali 3 perkara.

Adapun di tahun 2022 ada 1 perkara putus yang berlanjut hingga ke upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2023, dan terdapat 3 perkara yang mengajukan peninjauan kembali di tahun 2023 dimana perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2021. Sehingga dalam tahun 2023, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya berjumlah 113 perkara.

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 34 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 34 Putusan banding tersebut 9 perkara tahun 2023 menyatakan menerima dan 25 perkara tahun 2023 mengajukan upaya hukum kasasi (1 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama) dan 24 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding.



C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 27 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 27 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 80%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2023 sejumlah 212 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 191 perkara dan sisa perkara sebanyak 21 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 97 % dan sisa perkara sebesar 3%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) .

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan



bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Untuk meraih sertifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak Pimpinan, Pejabat Struktural dan semua pegawai harus punya kesabaran yang sama untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan penerapan ISO adalah :

1. Kepuasan Publik

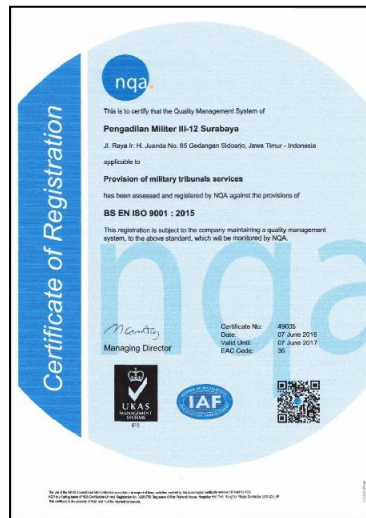
Bahwa sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti-bukti pelayanan prima yang berstandar internasional, dan diakui dunia. Pelayanan disemua bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa saja yang memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan konsumen tentu akan merasakan kepuasan.

2. Perubahan

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan ISO tentu akan berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah menerapkan sistem Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.



Gambar V.3 Sertifikat ISO 9001:2015



1. POSBAKUM

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Perma ini menatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di jajaran Mabes TNI oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit di luar Mabes TNI di Satuan/ Dinas Hukum Masing-masing Angkatan. Sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mendapatkan alokasi anggaran Posbakum.

2. PELAYANAN SIDANG KELILING

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Dari 35 perkara yang diagendakan melalui sidang keliling, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 33 perkara, melebihi target dari 30 perkara yang ditargetkan untuk diselesaikan melalui sidang keliling pada Tahun 2023.



Kegiatan sidang keliling ditujukan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa jaraknya relatif jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d Kamis / 13 s.d 16 Maret 2023 Bertempat di PA Kota Malang	14 Perkara	12 Perkara
2	Kamis s.d Selasa / 22 s.d 27 Juni 2023 Bertempat di PA Kota Malang	10 Perkara	10 Perkara
3	Senin s.d Kamis / 16 s.d 19 Oktober 2023 Bertempat di PA Kota Malang	11 Perkara	10 Perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan.

Adapun untuk beberapa perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Pemeriksaan berkas perkara baru dimulai dari pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan beberapa saksi, dan tidak semua saksi hadir sehingga sidang dilanjutkan di kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Perkara Peninjauan Kembali yang Terdakwanya berada di Kota Malang sehingga pemeriksaan sidang PK hanya sebatas pembacaan memori PK dan tanggapan oditur Militer atas memori PK dari Pemohon PK.



3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut terdiri dari :

- Layanan Pembebasan biaya perkara
- Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.
- Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan terhadap perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Oleh karena itu Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, maka tidak ada pembebasan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Militer.

4. KEUANGAN DARI PERKARA

Di setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa atau Negara, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2023, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa atau Negara melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.630.000
2	Pelanggaran	Rp. 107.500
3	Denda Kejahatan	Rp. 1.050.000.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 3.400.000
Jumlah Total		Rp 8.642.500



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Pada Tahun 2023 SDM berjumlah 42 orang dengan rincian 24 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang PPNNP dan 1 (satu) orang pegawai BP (diperbantukan) dari Pengadilan Militer III-16 Makasar, 1 (satu) orang pegawai BP (diperbantukan) ke Pengadilan Militer III-13 Madiun.

SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PPNNP belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNNP dalam struktur organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	Kosong
		Panmud Hukum	Kosong



		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana	5 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	0 Orang
		Pengelola Perkara	2 Orang
		2	Non Tehnis Pengadilan
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	0 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengelola Kepegawaian	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	3 Orang
		Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

A. DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

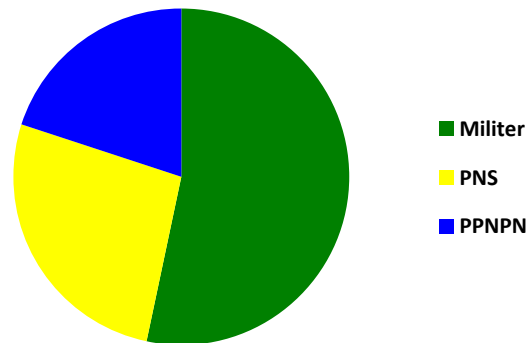
Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPNPN	9	20,00
Jumlah Total		43	100.00



Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	23	1
2	PNS	3	9
3	PPNPN	7	2
Jumlah Total		33	12

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	2	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	1	-
6	Peltu	3	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	2	-



9	Serka	4	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	1	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	1	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	3
21	III/a	-	1
22	II/d	-	-
23	II/c	-	3
Jumlah Total		24	12

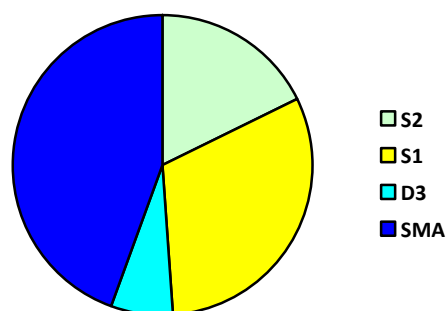
4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PPNP, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNP	
1	S-2	7	1	-	8
2	S-1	8	5	1	14
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	9	3	8	20

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan





Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	1	3	3	7
2	31 – 40 Tahun	5	3	5	13
3	41 – 50 Tahun	14	3	-	17
4	51 – 58 Tahun	4	3	1	8

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas



kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Pada Triwulan I 2023 terdapat pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang selesai melaksanakan Pendidikan Secaba pada tahun 2022 dalam penempatan tugas di kembalikan ke Lingkungan Mabes TNI sebagai Bintara Kodim 0819/Pasuruan Korem 083/BDJ.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Amin Matsuri, S.H. Serda NRP 31100130381289	Pengadministrasi Perkara, Panmud Pidana	169/SEK/KP.I/SK/XII/ 2022 07-12-2022	17-01- 2023
2	Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH. / 636558	Anggota Pokkimmil Gol V	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023	04-08- 2023
3	Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol CHK (K) 11980036240871	Anggota Pokkimmil Gol V	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023	21-08- 2023

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Pada Triwulan I tahun 2023 belum ada Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12



Surabaya. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Jonarku, S.H., M.H. Letkol Sus 528375	Wakil Kepala	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023	30-05-2023
3	Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Letkol Sus/524432	Anggota Pokkimmil Gol. V	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023	30-05-2023
4	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (KH) 18870/P	Anggota Pokkimmil Gol. VI	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023	30-05-2023
5	Feri Afzudi. Serka 21130148940892	Pengelola Barang Milik Negara	480/SEK/KP.I/SK/IV/202 3 28-04-2023	30-05-2023

C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.



1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta, di Triwulan I Tahun 2023 ada kenaikan pangkat bagi Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kenaikan pangkat reguler ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk / 11980058680275	Kolonel	16/TNI/TAHUN/2023 28 Maret 2023	01-04- 2023
2	Sumardi, Sertu / 31960173740276	Serka	Kep/200-33/III/2023 28 Maret 2023	01-04- 2023
3	Francisca Angelia R,SH Penatan Muda / III/a 199106082019032009	Penata Muda TK.I	W3.Mil/01/KP.04.1/SK/III/2023 27 Maret 2023	01-04- 2023
4	Firda Nuril Hanifah, S.Si, M.SPSDM, Penata Tk. I / III/d 197804081996042001	Pembina/ IV/a	972/SEK/SK.KP2.1.1/IX/2023 7 September 2023	01-10- 2023
5	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata Muda TK,I / III/b 197608251998032002	Penata III/c	2/KPMT.W3.Mil/KP2.1.1/IX/2023 26 September 2023	01-10- 2023
6	Marzuki, Koptu Mus / 112371	Kapka	Kep/2386/IX/2023 20 September 2023	01-10- 2023
7	Wahyu Ariwijaya, Praka / 31120174740292	Kopda	Kep/692-33/IX/2022 11 September 2022	01-10- 2023

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau



karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Pada Tahun 2023 terdapat kenaikan jabatan serta mutasi internal terhadap pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Pelda Slamet / 21020097980681,	Pengelola BMN	Panitera Pengganti Gol. IX	01-02-2023
2	Serma Keu Nuryati, SH / 104997	Bendahara	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	15-02-2023
3	PNS Setijo Utomo, III/b. 197003071994031002	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Pengadministrasi Keuangan	15-02-2023
4	PNS Norma Azurah, S.E.I. III/a 199605022020122014	Penyusun Laporan Keuangan	Bendahara	15-02-2023
5	Serka Suwoko / 31950160391072	Pengolah Daftar Gaji	Pengelola Perkara, Panmud Hukum	15-02-2023
6	Anggraini Esti Rahayu, A.Md. II/c, 1997012602203201	CPNS	PNS	28-02-2023
7	Dina Astari, A.Md. II/c. 199706162022032017	CPNS	PNS	28-02-2023
8	Melanti Puspara , S.E. 198405302006042002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	15-05-2023

D. PENSUN

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan



Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinasnya pada usia 58 tahun.

Pada Tahun 2023 tidak terdapat pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pensiun.

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.11 Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Pelatihan teknis yudisial penistaan Agama bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Tahap I, Mandiri 27 Februari s.d. 3 Maret 2023 Tahap II, Bogor 6 s.d. 11 Maret 2023	Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH.
2	Pelatihan Teknis Yudisial pembuatan putusan dan problema penyelesaian hokum perkara koneksitas	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Tahap I, Mandiri 6 s.d. 10 Maret 2023 Tahap II, Medan 13 s.d. 17 Maret 2023	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.
3	Pelatihan manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara.	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Diklat PKN Yogyakarta, 3 s.d 6 April 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
4	Pelatihan peningkatan	Komisi Yudisial	Bogor, 8 s.d. 12 Mei 2023	- Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.



	kapasitas Hakim.			- Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH.
5	Training of Tutor Pelatihan III PPC IV, Peradilan Militer	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Pusdiklat Kumdil, 14 s.d. 18 Mei 2023	- Kolonel Chk Sugeng Aryanto,SH.MH. - Letkol Chk Arif Sudibya, SH - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH.MH, MAP.
6	Pelatihan SPIP	Balitbang Kumdil MARI	Balai Diklat PKN Sulsel BPK RI, 21 s.d. 26 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
7	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ PP Peradilan Militer	Balitbang Kumdil MARI	Tahap I. Mandiri 1 s.d. 4 Agustus 2023 Tahap II, Klasikal 6 s.d. 12 Agustus 2023	- Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, SH - Peltu Rudianto, S.H. - Peltu Faried Sunaryunan, SH. - Pelda Slamet
8	Penyusunan RBPP dan RBMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Jakarta, 21 s.d. 24 Agustus 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.
9	Penyusunan Naskah Urgensi Tahun 2023” Penerapan Restorative Justice dalam penjatihan pidana Prajurit TNI yang melakukan KDRT”	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 7 s.d. 9 September 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.
10	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Hakim TK pertama, Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Bogor, 12 a.d. 17 November 2023	- Letkol Kum Jonarku, S.H., M.H. - Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH.MH.MAP.

Tabel III.12 Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek Panitera/ Panitera Pengganti	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 20 s.d. 22 Februari 2023	- Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H. - Pelda Slamet
2	Bimtek Hakim Militer	Dirjen	Online Satker 20 s.d. 22	- Mayor Chk



	TA. 2023	Badilmiltun MA RI	Februari 2023	Musthofa, SH.MH. - Mayor Chk Ujang Taryana, SH, MH.
3	Bimtek Panitera/ PP Peradilan Milirter TA. 2023	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring 2 s.d. 4 Agustus 2023	- Kapten Sus Kholip, S.H. - Pelda Suhendra, S.H.
4	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI	Virtual, 28,29 Agustus 2023	- Kepala - Wakil Kepala - Anggota Pokkimmil - Panitera - Sekretaris
5	Konsinyering Finalisasi Penyusunan Naskah TA 2023 Restorative Justice Prajurit TNI melakukan KDRT, Wilayah Jateng	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Semarang, 20 s.d. 22 September 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P
6	Bimtek Teknis Kepaniteraan	Dilmiltama	Yogyakarta 20 s.d. 22 September 2023	<u>Luring :</u> - Peltu Moh Fauzan - Pelda Suhendra <u>Daring :</u> - Kapten Sus Kholip, S.H. - Pelda Slamet
7	Bimtek Kesekretariatan	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Mojokerto, 11 s.d. 13 Oktober 2023	- Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d - Setijo Utomo, PNS-III/b
8	Pembinaan Pengelolaan PNPB	KA BUA	Malang, 30 November s.d. 2 Desember 2023	- Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a - Dina Astari, A.Md. PNS II/c
9	Pembinaan Kesekretariatan	KA BUA	Surabaya, 13 s.d. 15 Desember 2023	- Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d

Tabel III.13 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan TA. 2022	KPPN Surabaya II	Surabaya 24 Januari 2023	PNS. Norma Azurah, S.E.I.
2	Sosialisasi langka-	KPPN Surabaya	Surabaya,	1. PNS. Firda Nuril



	langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2023	II	21 Februari 2023	Hanifah, S.Si., 2. PNS Norma Azurah, S.E.I.
3	Pendampingan RKBMN TA 2025	BUA MA RI	Malang, 29 Maret 2023	PNS. Firda Nuril Hanifah, S.Si., Pelda Slamet
4	FGD Penyusunan Naskah Kebijakan TA 2023.	Komisi Yudisial RI	Online 5 April 2023	- Letkol Chk Arif Sudibyo, SH. - Kapten Sus Kholip, SH.
5	FGD Penyusunan Naskah Urgensi TA 2023 "Penerapan Restorative Justice Prajurit TNI yang melakukan KDRT"	Balitbang Kumdil MA RI	Daring 10 Mei 2023	- Mayor Chk Musthofa, SH.MH. - Kapten Sus Kholip, SH.
6	Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Gel. I	Kapusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Online. 11 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
7	Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Gel. I	Kapusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Online. 11 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
8	Focus Group Discussion (FGD) wilayah Hukum Gorontalo	Kabalitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 27 Juni 2023	Kapten Kum Kholip, S.H.
9	Sosialisasi kepersertaan JKN TNI dan POLRI Kab. Sidoarjo	BPJS Kab. Sidoarjo	Sidoarjo, 20 Juli 2023	- Setijo Utomo, PNS III/b - Praka Wahyu Ari Wijaya
10	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Tvl. III TA. 2023	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 3 Oktober 2023	- Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b - Serka Feri Afzudi
11	Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023	KPPN Surabaya II	Surabaya, 25 Oktober 2023	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b



F. UJIAN / TEST KENAIKAN GOLONGAN

Bagi Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya baik anggota TNI maupun PNS yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi diusulkan untuk mengikuti test atau seleksi kenaikan golongan setingkat lebih tinggi dari golongan yang diembannya, Pegawai yang telah mengikuti test atau seleksi adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Daftar Peserta Ujian/Test Kenaikan Golongan

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Ujian Dinas Elektronik (e-Expam)	Biro Kepegawaian MARI	Online Satker 17 Mei 2023	Rijani Widyanti, PNS III/d Ainur Rofiq, S.E. PNS III/d
2	Seleksi Diktuba TNI AL Angkatan LIV TA 2023	KASAL	Surabaya, 12 s.d. 16 Juni 2023	Kopda Mus Marzuki
3	Tes Casis Diktuba TNI AD TA. 2024	KASAD	Malang, 30 Oktober s.d. 2 November 2023	Serka Aji Wibayu, S.H., M.H.

G. PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pendidikan pengembangan bagi Perwira TNI serta PNS bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan guna persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi ataupun jabatan fungsional, Pegawai yang telah mengikuti adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Daftar Pengembangan Kompetensi SDM

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Fit and Proper test calon Pimpinan Pengadilan Type A	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 07, 09 Februari 2023 Offline, Gedung Sekretariat MA RI 15 Februari 2023	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.
2	Susjabkimmil TNI	Panglima TNI	Kodiklat TNI 10 Mei s.d. 4 Agustus 2023	Letkol Chk (K) Kus Indrawati, SH, MH.
3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/jasa	Balitbang Kumdil MARI	BPSDM Jatim 11 s.d. 15 Juni 2023	Norma Azurah, S.E.I. PNS-III/a



4	Ujian Potensi dan penilaian kompetensi wilayah hukum Surabaya	Biro Kepegawaian MARI	I.Zoom Meetingg 13 Oktober 2023 II.Pengadilan Tinggi Sby, 17 Oktober 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si,
---	---	-----------------------	--	----------------------------

I. Focus Group Discussion (Fgd), Rapat Koordinasi Dan Sarasehan

Focus Group Discussion (Fgd), Rapat Koordinasi dan Sarasehan, kegiatan ini dilaksanakan oleh Pimpinan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI. FGD, Rakor dan Sarasehan yang telah diikuti pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 16 Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan

No	Jenis Pembinaan / Rakor	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Refleksi kinerja Tahun 2022, Pembinaan dan pengarahan rencana kerja TA 2023	Dilmiltama	Jakarta 12, 13 Januari 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
2	Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI	Pengadilan Negeri Surabaya	Surabaya 20 Februari 2023	Kapten Sus Kholip, SH Peltu Rudianto, SH. Safril Adi Husada, A.Md.
3	FGD Penyusunan Naskah Kebijakan TA 2023.	Komisi Yudisial RI	Online 5 April 2023	- Letkol Chk Arif Sudibyjo, SH. - Kapten Sus Kholip, SH.
4	FGD Penyusunan Naskah Urgensi TA 2023 "Penerapan Restorative Justice Prajurit TNI yang melakukan KDRT"	Balitbang Kumdil MA RI	Daring 10 Mei 2023	- Mayor Chk Musthofa, SH.MH. - Kapten Sus Kholip, SH.
5	Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI.	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Tinggi Surabaya 11 Mei 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kapten Sus Kholip, SH. Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
6	Focus Group Discussion (FGD) wilayah Hukum Gorontalo	Kabalitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 27 Juni 2023	Kapten Kum Kholip, S.H.



7	Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK) Tahun 2024	Pusdiklat Menpin Balitbang Kumdil MA RI	Surabaya, 20 September 2023	- Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. - Kapten Sus Kholip, SH. - Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
8	Rakor Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer Tingkat Pertama,	Kadilmilti III Surabaya	Zoom Meeting, 22 s.d. 25 Agustus 2023	- Wakil Kepala - Hakim Pengawas Bidang
9	Undangan Rapat dan Koordinasi Konsultasi	Mahkamah Agung RI	Bogor 20 s.d. 22 September 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
10	Undangan Rapat Koordinasi	Dirjen Badilmiltun MARI	Jogyakarta, 25 s.d. 27 September 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
11	Sarasehahan Perwira Korps Hukum TNI AL	Kasal	Trawas Mojokerto. 1 November 2023	Mayor Laut Mirza Ardiyansah, SH, MH, MAP.
12	Rapat Koordinasi Teknis	Dirjen Badilmiltun MARI	Batam, 6 s.d. 8 November 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
13	Pembinaan dan Rapat Koordinasi Pembentukan Dilmil Baru	Kadilmiltama	Makasar, 16 s.d. 18 Juli 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

H. DATA KUNJUNGAN/MAGANG MAHASISWA

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :



Tabel III. 17 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Sby	Magang Mandiri	13 Februari s.d. 4 Maret 2023	
2	Univ. 17 Agustus 1945	Magang MB-KM	15 April s.d. 15 Juli 2023	2 orang mahasiswa
3	Univ. Wijaya Kusuma	Magang MB-KM	23 Maret s.d. 23 Juni 2023	5 orang mahasiswa
4	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Observasi	22, 23 Mei 2023	Mahasiswa semester IV
5	Univ. Madura	Mengikuti Persidangan	15 Juni 2023	Para Mahasiswa
6	Univ. Bhayangkara Surabaya	Magang	16 Juni s,d, 16 Agustus 2023	4 orang mahasiswa
7	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio lomba Persidangan semu	19 dan 26 Agustus 2023	Tim lomba Persidangan Semu
8	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	7 Oktober 2023	Gladi bersih lomba Persidangan semu
9	Univ. Gajah Mada Yogyakarta	Latihan Babak Final Pengadilan Semu	12 Oktober 2023	Mahasiswa Peserta lomba
10	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio pengembangan SDM Mahasiswa	4 November 2023	Para Mahasiswa
11	Univ. Muhamadiyah Malang	Observasi	30 November 2023	2 Orang Mahasiswa
12	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	15 September 2023 dan 15 Oktober 2023	Peserta lomba Persidangan Semu
13	Intitut Teknologi Adhi Tama Surabaya	Kerja Praktek	15 November s.d. 14 Desember 2023	1 Orang Mahasiswa
14	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2,3, 8, 17 Desember 2023	Peserta lomba Persidangan Semu Piala Kasad

Kegiatan lain yang telah dilakukan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil MARI Nomor 386/Bld.3/Dik/S/3/2023 tanggal 14 Maret 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima Magang Tahap III dari tanggal 20 Maret 2023 s.d.



31 Mei 2023, peserta program Pendidikan dan Pelatihan PPC Terpadu Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan IV sebanyak lima orang atas nama :

1. Muhamammd Nur Sakdi, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11040032050782;
2. Andhika Dimas Dwipa, S.H. Mayor Chk NRP 11090016420685;
3. Hendra Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11130027681088;
4. Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787;
5. Nandar Fransiska, S.H. Kapten Chk NRP 11070077240186

2. Berdasarkan surat Kabadan Balitbang Diklat Kumdil Nomor 801/Bld/S/11/2023 tanggal 8 November 2023, telah selesai melaksanakan magang peserta program Pendidikan dan Pelatihan PPC Terpadu Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan IV sebanyak lima orang dan telah di Wisuda pada tanggal 23 November 2023. Peserta program Pendidikan dan Pelatihan PPC Terpadu Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan IV sebanyak 5 (lima) orang atas nama :

1. Muhamammd Nur Sakdi, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11040032050782;
2. Andhika Dimas Dwipa, S.H. Mayor Chk NRP 11090016420685;
3. Yanuar Dwi Prasetyo, S.H. M.H. Mayor Chk NRP 11060023120185.
4. Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787;
5. Hendra Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11130027681088;



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA 2023 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/KP.04.6/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023 yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2023. Dikarenakan adanya pergantian pejabat Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka diterbitkanlah kembali Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/09/KP.04.6/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023 yang berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).



Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 mengalami dua kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp. 4.541.016.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Belas Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.541.016.000 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.1 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 17 April 2023	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 511121 (Penyesuaian harga satuan)	28.060.000	46.526.000	18.466.000
	Belanja Tunjangan Anak PNS 511122 (Penyesuaian harga satuan)	9.233.000	12.426.000	3.193.000
	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Penyesuaian harga satuan)	420.429.000	383.690.000	(36.739.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.761.360.000	2.776.440.000	15.080.000
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Penambahan akun Langganan Air Minum)	715.593.000	718.593.000	3.000.000



	Belanja Barang Operasional Lainnya 521119 (Pergeseran Anggaran Penyemprotan Disinfektan)	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)
Revisi Kedua 19 Juni 2023	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	6.615.167.000	4.615.167.000	(2.000.000)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	16.000.000	16.960.000	960.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pergeseran Anggaran dalam POK)	1.500.000	540.000	(960.000)
Revisi Ketiga 12 Juli 2023	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	131.080.000	128.980.000	(2.100.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.776.440.000	2.778.540.000	2.100.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	18.000.000	10.500.000	(7.500.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	12.000.000	4.500.000	(7.500.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	6.000.000	6.150.000	150.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	16.960.000	31.810.000	14.850.000
	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	631.640.000	536.686.000	(94.954.000)
Revisi Keempat 23 Oktober 2023	Belanja Tunjangan Struktural PNS (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	40.320.000	36.000.000	(4.320.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke	128.980.000	3.000	(128.977.000)



	Eselon 1)			
	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	383.690.000	567.000	(383.123.000)
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	224.664.000	104.200.000	(120.464.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	2.778.540.000	1.993.461.000	(785.079.000)
	Belanja Tunjangan PPh TNI 511225 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	309.736.000	264.088.000	(45.648.000)
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Penambahan Pagu Langganan Air Minum dari Pergeseran Anggaran dalam POK)	718.593.000	721.061.000	2.468.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	10.500.000	7.920.000	(2.580.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	4.500.000	1.080.000	(3.420.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	6.150.000	7.800.000	1.650.000
	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Pergeseran Anggaran dalam POK)	164.520.000	173.160.000	8.640.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 (Pergeseran anggaran dalam POK)	165.303.000	155.641.000	(9.662.000)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	31.810.000	34.714.000	2.904.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 (Penambahan Anggaran / ABT)	0	40.000.000	40.000.000
Revisi Kelima	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125	567.000	677.000	110.000



06 Desember 2023	(Pergeseran Anggaran dalam POK)			
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	104.200.000	104.090.000	(110.000)
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	60.440.000	60.080.000	(360.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	7.800.000	8.160.000	360.000

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.052.602.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.448.414.000
53	Belanja Modal	Rp. 40.000.000
Jumlah		Rp. 4.541.016.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2023 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 171.127.954	Rp. 55.044.670	Rp. 0
Februari	Rp. 161.226.478	Rp. 98.295.967	Rp. 0
Maret	Rp. 156.876.775	Rp. 76.857.687	Rp. 0
April	Rp. 629.674.543	Rp. 143.708.020	Rp. 0
Mei	Rp. 155.753.271	Rp. 121.954.068	Rp. 0
Juni	Rp. 399.064.927	Rp. 84.665.444	Rp. 0
Juli	Rp. 216.716.245	Rp. 142.058.671	Rp. 0
Agustus	Rp. 200.741.345	Rp. 270.402.236	Rp. 0
September	Rp. 254.750.095	Rp. 73.928.952	Rp. 0
Oktober	Rp. 218.174.683	Rp. 132.650.424	Rp. 0
November	Rp. 218.310.683	Rp. 83.232.039	Rp. 39.985.000



Desember	Rp.	194.613.924	Rp.	155.416.412	Rp.	0
Jumlah	Rp.	2.977.030.923	Rp.	1.438.214.590	Rp.	39.985.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.541.016.000	100
Realisasi	Rp. 4.455.230.513	98,11
Sisa	Rp. 85.785.487	1,89

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98.11%

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2023, Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.176.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dari DIPA 05 tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 179.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel IV.5 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 12 Juli 2023	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK	16.000.000	22.350.000	6.350.000



	Perkara)			
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Makan Persidangan di Luar Jam Dinas)	27.720.000	32.760.000	5.040.000
	Belanja Jasa Profesi 522151 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	11.430.000	5.080.000	(6.350.000)
	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	37.280.000	32.240.000	(5.040.000)
Revisi Kedua 13 September 2023	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pengembalian Anggaran ke Eselon I)	32.240.000	29.240.000	(3.000.000)
Revisi Ketiga 07 Oktober 2023	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Tingkat Pertama)	12.000.000	15.270.000	3.270.000
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	22.350.000	25.620.000	3.270.000
	Belanja Jasa Profesi 522151 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	5.080.000	1.270.000	(3.810.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Upaya Hukum)	12.000.000	15.270.000	3.270.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	29.240.000	23.240.000	(6.000.000)



Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 4.977.250	Rp. 0
Februari	Rp. 10.588.000	Rp. 0
Maret	Rp. 5.240.000	Rp. 20.180.000
April	Rp. 0	Rp. 0
Mei	Rp. 9.582.900	Rp. 0
Juni	Rp. 5.990.500	Rp. 0
Juli	Rp. 9.726.000	Rp. 20.180.000
Agustus	Rp. 9.917.250	Rp. 0
September	Rp. 10.883.150	Rp. 0
Oktober	Rp. 10.085.550	Rp. 20.180.000
November	Rp. 9.839.800	Rp. 0
Desember	Rp. 17.670.540	Rp. 0
Jumlah	Rp. 104.500.940	Rp. 60.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 176.850.000	100%
Realisasi	Rp. 165.040.940	93,32%
Sisa	Rp. 11.809.060	6,68%

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2023 sebesar 93.32%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor,



kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kegiatan belanja modal yaitu pengadaan Meubelair. Pengadaan Meubelair berupa meubelair kantor yang terdiri dari kursi direktur untuk Wakil Kepala, Lemari Besi untuk lemari arsip persuratan, kursi staf untuk ruang rapat, loker untuk menyimpan barang dan penitipan barang serta kursi lipat untuk keperluan kantor. Pengadaan Meubelair tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadaan Meubelair dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Rincian pengadaan meubelair sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.



Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Printer 2 unit @Rp.5.000.000	Rp. 10.000.000
	Realisasi : Pelaksanaan bulan Mei 2022 Total Belanja 2 Unit = Rp.8.873.874. PPN = Rp.990.991 PPH Pasal 22 = Rp.135.135 Grand Total = Rp.10.000.000 Sisa Pagu = Rp.0	
2.	Sarana Disabilitas	Rp. 20.000.000
	Realisasi: Pelaksanaan bulan Oktober 2022 Total Belanja = Rp.17.587.026 PPN = Rp.1.974.055 PPH 22 = Rp.358.919 Grand Total = Rp.19.920.000 Sisa Pagu = Rp.80.000	
	Prasarana Disabilitas	Rp. 30.000.000
Total Nilai		Rp. 60.000.000

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

1) Tanah

Berdasarkan pengelompokan aset Tanah dan Gedung Bangunan yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

1) Aset tanah.

Tabel IV.9 Rincian Tanah

No	Nama Barang	Jenis Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Tanah Seluruhnya	Alamat
1	2	3	4	5	7
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	15,140,580,000	1,974	SEDATI AGUNG
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	46,445,128,259	3,539	Jl Juanda No 85 Sidoarjo



2) Aset Gedung Bangunan.

Tabel IV.10 Rincian Aset Gedung Bangunan

No	Nama Barang	Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Bangunan	Jalan
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	IMB	4,427,663,000	1,440	Jl. Raya Juanda

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Peralatan Mesin Non Tik
- 3) Peralatan Khusus Tik
- 4) Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2023 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :



Tabel IV.11 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.12 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000
3.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Sewa
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000
Total Nilai				Rp. 438.850.000

2) Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.13 Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1	Kursi Roda	1	Unit	Rp. 2,265,000
2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Unit	Rp. 1,500,000
3	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit	Rp. 2,200,000
4	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9,900,000
5	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Rp. 32,998,350
6	Mesin Fotocopy Folio	2	Unit	Rp. 60,600,000
7	Lemari Besi/Metal	14	Unit	Rp. 4,750,000
8	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 4,950,000



9	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp.	2,953,500
10	Brandkas	1	Unit	Rp.	4,000,000
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	Rp.	990,000
12	Locker	2	Unit	Rp.	3,550,000
13	Box Printer dan Reader Smart Card	2	Unit	Rp.	5,000,000
14	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	4,928,000
15	Rambu-Rambu	1	Unit	Rp.	1,010,000
16	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Rp.	19,965,000
17	Papan Visual/Papan Nama	34	Unit	Rp.	1,010,000
18	Movitex Board	1	Unit	Rp.	17,630,000
19	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp.	3,115,000
20	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp.	1,479,500
21	Mesin Laminating	1	Unit	Rp.	2,129,050
22	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp.	9,620,000
23	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit	Rp.	1,996,500
24	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	Rp.	26,994,550
25	Meja Kerja Kayu	80	Unit	Rp.	900,000
26	Kursi Besi/Metal	104	Unit	Rp.	665,000
27	Kursi Kayu	15	Unit	Rp.	2,176,150
28	Sice	5	Unit	Rp.	13,475,000
29	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp.	2,176,130
30	Meja Rapat	2	Unit	Rp.	9,933,000
31	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp.	1,630,000
32	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1,382,700
33	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13,640,330
34	Partisi	4	Unit	Rp.	14,648,700
35	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Unit	Rp.	1,015,650
36	Mesin Penghisap Debu /vacuum Cleaner	2	Unit	Rp.	2,101,000
37	Mesin Pel/Poles	2	Unit	Rp.	24,948,000
38	Mesin Pemetong Rumput	4	Unit	Rp.	3,982,000
39	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19,772,500
40	Lemari Es	3	Unit	Rp.	4,482,500
41	A.C. Split	45	Unit	Rp.	8,970,500
42	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9,500,500
43	Televisi	5	Unit	Rp.	19,987,000
44	Loudspeaker	4	Unit	Rp.	10,434,000
45	Sound System	1	Unit	Rp.	39,999,300
46	Microphone	7	Unit	Rp.	549,450
47	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	1,061,500
48	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	1,485,000
49	Dispenser	7	Unit	Rp.	1,793,000
50	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	212,300
51	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14,905,000
52	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Rp.	2,155,620
53	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Unit	Rp.	495,000
54	Audio Mixing Console	1	Unit	Rp.	16,483,500
55	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Unit	Rp.	1,034,520
56	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5,447,200



57	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4,950,000
58	LCD Monitor	1	Unit	Rp.	10,644,900
59	Camera Conference	1	Unit	Rp.	25,518,900
60	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit	Rp.	2,948,000
61	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	4,950,000
62	Alat Studio Lainnya	1	Unit	Rp.	4,950,000
63	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp.	24,915,000
64	Facsimile	2	Unit	Rp.	3,550,000
65	Genset	1	Unit	Rp.	198,969,000
66	Alat Kedokteran THT Lainnya	1	Unit	Rp.	1,692,750
67	Walker Polding	4	Unit	Rp.	1,110,000
Nilai Total				Rp.	1,992,481,715

3) Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.14 Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai	
1.	Local Area Network (LAN)	1	Unit	Rp.	12,536,194
2.	Komputer Jaringan Lainnya	2	Unit	Rp.	115,740,000
3.	P.C Unit	39	Unit	Rp.	543,524,610
4.	Lap Top	27	Unit	Rp.	425,599,550
5.	Tablet PC	1	Unit	Rp.	444,000
6.	Komputer Unit Lainnya	1	Unit	Rp.	102,352,500
7.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Unit	Rp.	55,165,100
8.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	Rp.	99,698,350
9.	Server	3	Unit	Rp.	223,655,000
10.	Router	1	Unit	Rp.	9,955,000
11.	Rak Server	1	Unit	Rp.	9,866,590
Nilai Total				Rp.	1,598,536,894

4) Aset tetap lainnya

Tabel IV.15 Daftar Aset tetap lainnya

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/ Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	2	4	5	6	7
1	1	Monografi	Baik	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Y	105,000
2	2	Monografi	Baik	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas,	85,000
Jumlah					190,000



3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 197.568.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 161.323.000,- (Seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2023 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana



dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di



persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

2. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/42/Kep/VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2023 adalah versi 5.3.1.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2023 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 176.92%.



3. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT)
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - Elektronik Integrated Planning System (e-IPLANS)
- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).



- b) Di Bidang Perkara
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
 - Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan (SIPTERA)
- c) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).
 - Chat Online berbasis Website.

4. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi. Terdapat 9 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT. Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Kecepatan akses 100 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan



sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.

Tabel IV.16 Spesifikasi Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant		
	OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan membangun sarana dan prasarana serta mengevaluasinya dengan melakukan penilaian internal dan eksternal.

Penilaian pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu melalui APM dan ISO. Sarana dan prasarana pelayanan pelayanan publik yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu PTSP, Pembangunan ZI dan Inovasi yang berupa aplikasi.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

- Area 1 : Kepemimpinan
- Area 2 : Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara
- Area 3 : Sarana Dan Prasarana
- Area 4 : Teknis Peradilan
- Area 5 : Layanan Pengadilan
- Area 6 : Kepegawaian Dan tata Laksana

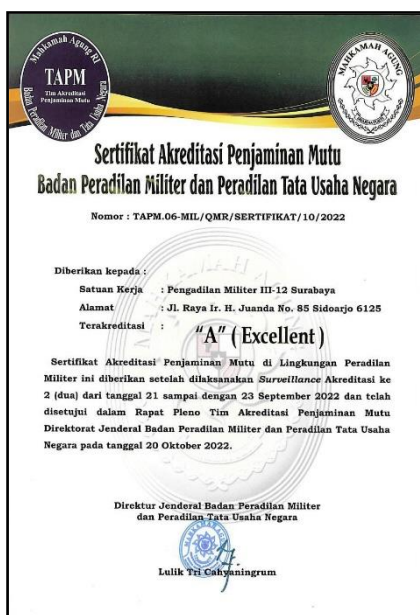


Area 7 : Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Pada tahun 2023 tidak ada penilaian surveillance akreditasi penjaminan mutu dari Ditjenbadilmiltun MARI terhadap Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sedangkan pada tahun 2022 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI melaksanakan surveillance akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Tugas Dirbinganisminmil Nomor 221 / DjMT / Ratgas / KP.01.3 / IX / 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Surveillance akreditasi penjaminan mutu ini merupakan proses sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria penilaian dipenuhi. Dari hasil audit surveillance akreditasi penjaminan mutu, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai "A" (*Excellent*). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu





B. ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu pengadilan dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK



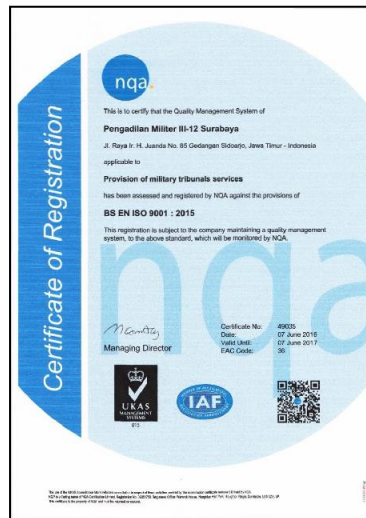
Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.

C. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.



Gambar V.3 Sertifikat ISO 9001:2015



D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.



Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tim PTSP Nomor W3-Mil01/13/Kep/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Salinan Putusan dan Akta BHT	19 layanan	Kepaniteraan
2	Petikan Putusan	1 layanan	Kepaniteraan

E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi



Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

2. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

3. Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.



4. Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

5. Aplikasi HARUM

Aplikasi HARUM merupakan aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelayanan publik Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Mei 2021. HARUM adalah kepanjangan dari Halaman Forum.

Aplikasi HARUM dimaksudkan sebagai media berbagi informasi dan diskusi tentang hukum dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi HARUM ini didasari oleh beberapa pemikiran yaitu :

1. Banyaknya permohonan data dari mahasiswa.

Sehubungan hal ini, dirasa akan memberi manfaat lebih apabila Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan media bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mencari informasi dan diskusi hukum dengan Hakim (pengampu yang ditunjuk) yang notabene memiliki keilmuan dan pengalaman dalam bidang hukum.

2. Kondisi pandemi.

Melalui media ini, mahasiswa dan masyarakat umum dapat tetap memperoleh informasi tanpa harus datang dan berinteraksi dengan petugas, sehingga tetap terjaga protokol kesehatan.

Aplikasi HARUM menyediakan layanan diskusi dan berbagi informasi dari masyarakat maupun dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi HARUM dijalankan dengan menunjuk Hakim sebagai pengampu atau narasumber.



6. Aplikasi SIPTERA

Aplikasi SIPTERA merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Juli 2021. SIPTERA adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan.

Aplikasi SIPTERA adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan antara *database* dengan *Microsoft Word* untuk membantu memudahkan kepaniteraan dalam membuat akta-akta dan persuratan. SIPTERA merupakan aplikasi internal kepaniteraan pertama di Dilmil III-12 Surabaya. Aplikasi SIPTERA dibangun dengan bahasa pemrograman SQL melalui *Microsoft Access* untuk kemudahan pengaturan *database*.

Pada SIPTERA terdapat tiga versi untuk setiap pihak berperkara, yaitu versi terdakwa, versi penasihat hukum dan versi oditur militer. Akta-akta dan surat-surat dari aplikasi SIPTERA bergantung pada siapa yang mengajukan upaya hukum. Dengan demikian akan meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses pembuatan akta dan surat yang dimaksud. SIPTERA sementara direncanakan dalam tiga kali tahapan. Tahap pertama adalah versi yang sedang digunakan dan dikembangkan saat ini di Kepaniteraan Dilmil III-12 Surabaya, tahap kedua yaitu integrasi dengan SIPP sehingga proses pengisian atau manajemen *database* bisa berjalan lebih efektif dan efisien dan tahap ketiga adalah tambahan Fitur BAS dan Konsep Putusan secara otomatis.

7. Chat Online berbasis Website

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Maret 2023.



Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna layanan di Internet yang di terdapat di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi ini bertujuan agar pengguna layanan dapat segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-1 Surabaya.

F. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kunjungan / Magang Mahasiswa

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel V.2 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Sby	Magang Mandiri	13 Februari s.d. 4 Maret 2023	
2	Univ. 17 Agustus 1945	Magang MB-KM	15 April s.d. 15 Juli 2023	2 orang mahasiswa
3	Univ. Wijaya Kusuma	Magang MB-KM	23 Maret s.d. 23 Juni 2023	5 orang mahasiswa
4	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Observasi	22, 23 Mei 2023	Mahasiswa semester IV
5	Univ. Madura	Mengikuti Persidangan	15 Juni 2023	Para Mahasiswa
6	Univ. Bhayangkara	Magang	16 Juni s,d, 16	4 orang mahasiswa



	Surabaya		Agustus 2023	
7	Univ. Muhamadiyah Malang	Observasi	30 November 2023	2 Orang Mahasiswa
8	Intitut Teknologi Adhi Tama Surabaya	Kerja Praktek	15 November s.d. 14 Desember 2023	1 Orang Mahasiswa

2. Peminjaman Ruang Sidang

Pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Mahasiswa, yaitu dalam hal peminjaman ruang sidang untuk keperluan akademik.

Tabel V 3 Data Peminjaman Ruang Sidang

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio lomba Persidangan semu	19 dan 26 Agustus 2023	Tim lomba Persidangan Semu
2	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	7 Oktober 2023	Gladi bersih lomba Persidangan semu
3	Univ. Gajah Mada Yogyakarta	Latihan Babak Final Pengadilan Semu	12 Oktober 2023	Mahasiswa Peserta lomba
4	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio pengembangan SDM Mahasiswa	4 November 2023	Para Mahasiswa
5	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	15 September 2023 dan 15 Oktober 2023	Peserta lomba Persidangan Semu
6	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2,3, 8, 17 Desember 2023	Peserta lomba Persidangan Semu Piala Kasad

G. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.



Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2023 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.

Survei dilaksanakan terhadap 50 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/33/Kep/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.4 di bawah ini.

Tabel V.4 Survei IKM Tahun 2023

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	2 Januari 2023 s.d. 4 April 2023	97.12	Sangat Baik
2	Triwulan II	4 April 2023 s.d 5 Juli 2023	97.56	Sangat Baik
3	Triwulan III	3 Juli 2023 s.d. 3 Oktober 2023	97.79	Sangat Baik
4	Triwulan IV	2 Oktober 2023 s.d. 29 Desember 2023	98.95	Sangat Baik



2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.5 Survei IPK Tahun 2022

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	2 Januari 2023 s.d. 4 April 2023	97.25	Sangat Baik
2	Triwulan II	4 April 2023 s.d. 5 Juli 2023	97.81	Sangat Baik
3	Triwulan III	3 Juli 2023 s.d. 3 Oktober 2023	97.93	Sangat Baik
4	Triwulan IV	2 Oktober 2023 s.d. 29 Desember 2023	98.93	Sangat Baik



BAB VI PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2022 yaitu :



1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/43/KEP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas. Yang selanjutnya dilakukan perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01 / KPM.W3.Mil01 / OT1.6 / IX / 2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- 1) Terjadinya pergantian Bendahara terhitung mulai tanggal per 1 Maret 2022 namun belum dilakukan penggantian nama Bendahara pada Aplikasi SAKTI.
- 2) Adanya kekosongan jabatan Pengelola BMN.
- 3) Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran semester 1 untuk Dipa 01 maupun Dipa 05.



b) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi Dan SIPP

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- 1) Laporan perkara di Aplikasi SIPP belum sinkron dengan laporan perkara di google Drive.
- 2) Bandwidth pada seluruh access point kantor disetting unlimited

c) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Kosongnya jabatan Panitera Muda Pidana, Panitera muda Hukum dan Kasubbag PTIP.
- 2) Adanya kekosongan jabatan Pengelola BMN.
- 3) Adanya permohonan /usul anggota untuk mengikuti pendidikan Secapa dan Secaba bagi anggota TNI

d) Pengawasan Bidang Administrasi Umum

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang administrasi umum adalah :

- 1) Ruang arsip berkas di Gudang bawah sudah di skat tetapi masih belum tertata rapi dan masih terlihat bertumpuk karena arak arsip sudah penuh.
- 2) Penataan tempat parkir kendaraan Roda Dua, Roda 4 milik Karyawan/pegawai dan milik Pengunjung / Tamu masih menjadi satu tempat
- 3) Inventarisir terhadap pemegang barang /BMN masih ditemukan belum adanya surat penyerahan tanggung jawab kepada personil pemegang barang BMN tersebut.
- 4) Tidak adanya ruang saksi yang memadai.
- 5) Kurangnya kerapihan dan kebersihan kantor



e) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

Masih terdapat BAS yang belum selesai tepat waktu.

f) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

pada Pengawasan Bidang Pelayanan Publik tidak ada Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik.

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/20/Kep/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/21/Kep/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2023 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/32/Kep/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan



intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/16/Kep/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.



Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2023 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel VI.1 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar. Pada Tahun 2023 pengawasan eksternal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1448/SEK/KU1.3/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan reuiu atas realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.495.898.100 yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
2. Pengawasan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1449/SEK/KU1.3/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Instruksi Tindak Lanjut atas Temuan Badan Pengawas Keuangan RI. Atas temuan Badan Pengawas Keuangan RI telah di tindak lanjuti oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil tindak lanjut tersebut dikirim melalui surat dengan Nomor : W3.Mil01/41/OT.01.2/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Pada tanggal 24 Oktober 2023 Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan Reuiu atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Pengawasan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 228/DJMT.1/KP7.1/VIII2023



tanggal 28 Agustus 2023 tentang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Asistensi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimana pengawasan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas program kerja serta optimalisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

LHKPN disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala, para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta



kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan

Tabel VI.2. LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2022

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2022	Letkol Chk Sugeng Aryanto, S.H NRP 11980058680275	16 Januari 2023
		Letkol Chk (K) Kus Indrawati, S.H.,M.H NRP 11980036240871	17 Januari 2023
		Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. NRP 11010036380878	14 Januari 2023
		Mayor Chk Musthofa, S.H.,M.H NRP 607969	10 Januari 2023
		Mayor Chk Ujang Taryana, S.H.,M.H NRP 636558	13 Januari 2023
		Kapten Sus Kholip, S.H NRP 519169	8 Maret 2023
		PNS Firda Nuril Hanifah, S.Si Nip 197804082006042001	27 Januari 2023
		PNS Ainur Rofiq, S.E Nip 197903172006041004	25 Januari 2023
		Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H NRP 544097	26 Januari 2023
		Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H NRP 21000075960980	16 Januari 2023
		Peltu Rudianto, S.H. NRP. 21960347440875	13 Januari 2023
		Peltu M. Fauzan, S.Ag. NRP. 21960346110176	31 Januari 2023
		Peltu Faried Sunaryunan, S.H. NRP. 21970306830676	13 Januari 2023
		Pelda Suhendra, S.H. NRP 21010150930781	19 Januari 2023

Adapun LHKASN juga telah dilaporkan oleh seluruh jajaran PNS di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V. Berikut dilampirkan LHKASN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

Tabel VI.3 LHKASN Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2022	Rijani Widyanti, Penata Tk.1 / III/d NIP 197011281990032001	30 Januari 2023
		Melanti Puspara, SE Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 198405302006042002	20 Januari 2023
		Setijo Utomo Penata Muda Tk.1 / III/b	3 Februari 2023



	NIP 1970030719940331002	
	Atim Sumarni Penata Muda Tk.1 / III/b	17 Januari 2023
	NIP 197004251998032001	
	Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk.1 / III/b	2 Februari 2023
	NIP 197608251998032002	
	Fransisca Angelina R., S.H. Penata Muda / IIIa	30 Januari 2023
	NIP 199106082019032009	
	Norma Azurah, S.E.I Penata Muda / IIIa NIP 199605022020122014	30 Januari 2023
	Safriil Adi Husada, A.Md Pengatur / Ilc NIP 198804262020121007	6 April 2022
	Anggraini Esti Rahayu, A.Md Pengatur / Ilc NIP 199701262022032011	18 Januari 2023
	Dina Astari, A.M.d Pengatur / Ilc NIP 199706162022032017	18 Januari 2023

C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

1. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

a) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :



- 1) Akan segera dikoordinasikan dengan KPPN Surabaya II terkait penggantian tersebut. Serta melengkapi dokumen-dokumen data dukung yang diperlukan.
- 2) Akan dilakukan Baperjakat Internal untuk Pengelola BMN agar dapat fokus dan optimal dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.
- 3) Agar segera direalisasikan untuk rencana kontrak yang telah disusun dan akan melakukan revisi pergeseran anggaran ke pos-pos yang diperlukan.

b) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi dan SIPP

Dari hasil pengawasan di bidang TI dan SIPP, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

Majelis Hakim dan Panitia Pengganti diharapkan bisa bekerjasama dalam mengupload putusan di Aplikasi SIPP.

c) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang kepegawaian, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Perlu penambahan personil Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Kasubbag PTIP agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu.
- 2) Akan dilakukan Baperjakat Internal untuk Pengelola BMN agar dapat fokus dan optimal dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.

d) Evaluasi Bidang Administrasi Umum

Dari hasil pengawasan di bidang administrasi umum, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :



- 1) Agar segera dilakukan pengadaan tempat dan Rak Arsip agar berkas-berkas yang sudah dalam usia tua/lama bisa di tempatkan di ruang tersendiri dengan di disusun /disimpan dengan rapi..
- 2) Agar segera dibuatkan tempat Parkir tersendiri dan dipisahkan antar parkir kendaraan baik Roda 4 maupun Roda 2 Milik pegawai/Karyawan dengan parkir kendaraan pengunjung dengan di beri tanda khusus.

e) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

Masih adanya BAS yang belum selesai tepat waktu mengakibatkan hambatan pada minutasi yang berakibat pada kecilnya nilai capaian SIPP. Untuk mengatasi hal ini, Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim memonitor dan mendorong terlaksananya penyelesaian BAS secara tepat waktu.

f) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya kekosongan petugas di meja PTSP pada saat jam kerja disebabkan kurangnya jumlah pegawai. Untuk mengatasi hal ini, akan disusun kembali jadwal piket petugas PTSP.
- 2) Pengisian survei yang belum maksimal disebabkan karena rusaknya e-kios sebagai perangkat untuk menampilkan aplikasi pengisian survei. Sebagai solusi, aplikasi survei dijadikan satu dalam perangkat yang sama dengan buku



tamu elektronik. Hal ini menyebabkan pengunjung tidak mengetahui keberadaan aplikasi survei tersebut, sehingga pengunjung tidak dapat mengisi survei.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2023 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2022 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Beban perkara sejumlah 212 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 191 perkara dan sisa perkara sebanyak 21 perkara.
2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 66 perkara atau 80% dari total perkara yang diputus.
3. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 98,11% dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 93,32%.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 5.3.1, dengan rasio penanganan perkara 176.92%.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 32 perkara.
7. Dari hasil wasmat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.
8. Nilai survei indeks kepuasan masyarakat di akhir tahun 2023 (Triwulan 4) sebesar 98.95 dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun Nilai survei indeks persepsi korupsi di akhir tahun 2023 (Triwulan 4) sebesar 98.93 dengan kategori SANGAT BAIK.



B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap berkenan memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kapaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.
3. Kepada Hakim Pengawas Bidang agar mengoptimalkan fungsi pengawasan dan selanjutnya dapat memberi rekomendasi tindak lanjut.